

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menguatnya tuntutan akuntabilitas menjadi fenomena dalam mendorong pemerintah untuk menyediakan laporan keuangan yang berkualitas yaitu dengan meningkatkan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kegiatan pemerintah berjalan dengan baik dapat diketahui melalui laporan keuangan (Wati dkk., 2014). Laporan keuangan menjadi dasar pengambilan keputusan dan berguna untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi penggunaannya dan pihak yang terkait. Seluruh entitas publik termasuk pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah secara transparan kepada publik. Pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disajikan harus mampu memberikan informasi keuangan yang berkualitas.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahun mendapat evaluasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) berupa opini yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Dapat dikatakan bahwa opini WTP merupakan opini tertinggi BPK yang menunjukkan bahwa laporan keuangan entitas pemerintah daerah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Penelitian ini dilakukan karena termotivasi adanya fenomena yang menunjukkan bahwa LKPD kabupaten Banyuwangi sukses dalam mendapatkan opini WTP 8 tahun berturut-turut. Banyuwangi sebagai salah satu kabupaten di Provinsi

Jawa Timur yang berhasil mempertahankan opini WTP murni dari pemeriksaan BPK. Kabupaten Banyuwangi yang dijuluki *sunrise of java* ini meraih peringkat pertama dan ditetapkan sebagai kabupaten / kota dengan kinerja terbaik di Indonesia oleh Kementrian Dalam Negeri dengan mendapatkan nilai A dalam hal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sebuah sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan yang memiliki empat fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja output program pembagunan, kinerja outcome program dan kinerja sasaran (detikNews, 2020). Opini WTP di lihat dari laporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Banyuwangi melalui laporan kinerja instansi pemerintah merupakan sasaran strategis, terdapat dua sasaran strategis yang ditetapkan dalam renstra BPKAD tahun 2016 sampai 2021 yaitu Opini WTP BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan WTP sebagai indikatornya dan terwujudnya sumberdaya manajemen perangkat daerah yang professional dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Untuk mencapai kedua sasaran tersebut, Analisa sumberdaya perlu dilakukan sebagai suatu upaya untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Analisa sumber daya berangkat dari penilaian kompetensi sumberdaya yang dimiliki. Selanjutnya melakukan identifikasi terhadap isu-isu strategis yang memerlukan perhatian yang dapat menghambat pencapaian sasaran. Untuk itu peningkatan kompetensi sumberdaya manusia sangat di harapkan sebagai penunjang peningkatan kualitas keuangan pemerintah daerah mendapatkan Opini WTP (bpkad.banyuwangikab.go.id). Salah satu keberhasilan Banyuwangi memperoleh opini WTP adalah berkat penerapan sistem pengendalian intern. Bapak Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa kabupaten Banyuwangi mendapatkan penilaian WTP Murni salah satunya karena Banyuwangi dinilai menerapkan pengendalian internal yang bagus. Tingkat penyimpangan atau kesalahan yang material dari tahun ke tahun terus menurun. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta oleh Bupati Banyuwangi untuk semakin meningkatkan kinerja dan memperbaiki konsolidasi internal dan eksternal (Fanani, 2020). Faktor-faktor yang

mempengaruhi pencapaian opini WTP sebagai tujuan pemerintah pusat adalah karena meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Isu terkait kualitas informasi laporan keuangan sangat menarik karena opini WTP merupakan salah satu tujuan perencanaan strategis daerah yang ingin dicapai kabupaten Banyuwangi, sehubungan dengan itu, diharapkan para pejabat SKPD dapat meningkatkan ketertiban dalam mengelola keuangan dan aset daerah serta mengembangkan SPI terbaik.

Penelitian ini berangkat dari penelitian Pujanira dan Taman (2017) yang menggunakan variabel independen kompetensi sdm dan variabel kualitas informasi laporan keuangan sebagai variabel dependen. Penelitian ini tetap menggunakan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel independen dan bertempat di Kabupaten Banyuwangi. Alasan peneliti menggunakan kompetensi sdm sebagai variabel independent karena peneliti ingin mengetahui apakah kompetensi sdm dapat mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan daerah sehingga mempengaruhi opini WTP dari BPK. Dilansir dari laporan kinerja instansi pemerintah badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Banyuwangi, bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah agar dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat, sasaran yang harus di capai yaitu meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan terwujudnya sumberdaya dan manajemen perangkat daerah masyarakat yang profesional. Analisa sumber daya berangkat dari penilaian kompetensi sumberdaya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Penelitian ini menambahkan penerapan Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPI) sebagai variabel mediasi karena WTP murni yang dicapai Banyuwangi menjadi salah satu alasan mengapa Banyuwangi menerapkan pengendalian intern yang baik, hal ini di sampaikan oleh Bapak Bupati Banyuwangi dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2020 di sidoarjo (detikNews, 2020). Penelitian menggunakan SPI sebagai variabel mediasi merupakan kebaruan dari penelitian ini, karena tidak ada penelitian sebelumnya yang

menggunakan SPI sebagai variabel mediasi dengan variabel independent kompetensi SDM terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.

Penelitian ini didukung oleh teori keagenan (*agency theory*), teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agen) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut *nexus of contract* (Jensen dan Meckling, 1976). Agen berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban agen kepada prinsipal atas pengelolaan keuangan daerah yang dibuat sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk mengelola keuangan. Untuk menciptakan laporan keuangan dibutuhkan tatakelola yang baik yaitu sistem pengendalian internal, adapun unsur dari sistem pengendalian internal antara lain, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberi perlindungan terhadap unsur-unsur laporan keuangan yang terdiri dari (aktiva, hutang, pendapatan, biaya), adanya praktik yang sehat, dan karyawan bermutu sesuai tanggung jawabnya.

Menurut penelitian Wati dkk. (2014) laporan keuangan yaitu produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi, sangat diperlukannya orang-orang yang berkompeten untuk menghasilkan laporan keuangan dikarenakan, penguasaan dan pemahaman ilmu akuntansi oleh SDM akan mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan untuk memenuhi kualitas laporan membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi. Kompetensi SDM yang dimiliki dapat mempengaruhi keberhasilan suatu entitas.

Kompetensi merupakan karakteristik seseorang dilihat pada keterampilan, kemampuan dan pengetahuan yang diberikan untuk menyelesaikan tugas (Hevesi, 2005) dan (Indriasari, 2008). Kompetensi merupakan dasar seseorang dalam mencapai kinerjanya. Akibat sumber daya manusia yang tidak berkompeten hasil dari pekerjaannya tidak tepat waktu, terdapat pemborosan waktu dan tenaga, dan pekerjaannya tidak secaa efektif tidak selesai. Pengetahuan dan pemahaman SDM tentang apa yang akan dilakukan, akan menghemat waktu penyusunan laporan keuangan, sehingga dapat selesai tepat pada waktunya (Mardiasmo, 2004).

Sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur penting untuk seluruh organisasi, baik sektor privat maupun sektor publik. Peran SDM dalam organisasi sektor publik di semua level manajemen menekankan pada kemampuan memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan hak publik. Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam organisasi sangat bergantung pada kualitas dan kemampuan SDM yang berada didalamnya. Penting bagi SDM mempunyai kompetensi untuk menghasilkan kualitas keuangan, karena yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pemerintah adalah manusia (Indriasih, 2014). Sebaik apapun suatu sistem bila tidak ditunjangi oleh kualitas SDM yang memadai maka akan sia-sia (Indriasih, 2014).

Sistem pengendalian internal pemerintah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, melindungi kekayaan negara dan mematuhi hukum yang berlaku guna untuk menyediakan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Menurut pasal 56 ayat (4) UU nomor 01 tahun 2004 dalam mengelola APBD, dikelola berdasarkan SPI dan diselenggarakan sesuai dengan SAP pemerintah, untuk itu system pengendalian merupakan faktor penting dalam menyusun LKPD yang berkualitas.

Meskipun variabel independent kompetensi SDM dapat meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, terdapat variabel lain yang

mendukung secara tidak langsung yaitu variabel mediasi sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern merupakan cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya organisasi. Selain itu sistem pengendalian intern mempunyai peran penting untuk mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan dalam pelaporan keuangan dan melindungi sumber daya.

Menurut Warren dkk(2005) salah satu tujuan SPI yaitu memeriksa keakuratan dan keandalan data akuntansi guna meminimalkan risiko kesalahan dalam menghitung atau mencatat, dan mengurangi adanya kemungkinan kekeliruan pemerintah daerah. Pengendalian internal yang lemah akan mempersulit deteksi kecurangan / ketidaktepatan dalam proses akuntansi, namun bila pengendalian internal yang baik maka dapat meningkatkan tata kelola. Jika sistem terintegrasi dan beroperasi sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab, maka kualitas sistem yang di rancang dapat bekerja dengan baik. SPI bagian dari sistem informasi akuntansi yang dapat mendukung kelancaran kerja.

Penjabat yang menyajikan laporan keuangan untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran dan perbendaharaan diharuskan memberikan pernyataan tanggung jawab terkait laporan keuangan, hal ini tertulis dalam PP No. 8 Tahun 2006. Telah disusun laporan keuangan berdasarkan SPI harus secara jelas dinyatakan oleh kepala SKPD. Terbitnya PP No.60 tahun 2008 tugas pengawasan tidak hanya mengawasi pengelolaan keuangan, tetapi juga memiliki peran pengawasan baru yaitu : Mengawasi secara internal sistem akuntabilitas keuangan negara / daerah untuk mendorong pelaksanaan, dan peninjau kembali laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh, Darmawan dan Darwanis (2018) yaitu Pengaruh Sistem Pengendalian Internal,

Pemanfaatan Teknologi, Kompetensi SDM serta Penerapan SAK Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Provinsi Aceh, populasi penelitian ini yakni SKPA Provinsi Aceh, menunjukkan hasil bahwa Kompetensi dalam sumber daya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan baik secara langsung maupun tidak. Artinya kompetensi SDM berpengaruh positif pada penerapan SPIP terhadap kualitas LKPD, SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Di dukung oleh studi yang di lakukan Pujanira dan Taman (2017), Syarifudin (2014) menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia yang memiliki Kompetensi mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas LKPD, Demikian pula penelitian oleh Ningtyas dan Andayani (2019) membuktikan bahwa antara SPIP dan SAP dapat mempengaruhi kualitas LKPD. laporan keuangan dapat berkualitas karena Sumber Daya Manusia dapat memberikan kinerja yang baik, sehingga tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah juga sangat penting dalam menjalankan kegiatan pemerintah. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Nadir dan Hasyim (2017), Ernawati dan Budiyo (2019), Febri, Dwi dkk (2019), Suhardjo (2019) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, baik pengaruh secara langsung maupun tidak langsung.

Penelitian ini membahas bagaimana sumber daya manusia yang kompeten mempengaruhi penyajian kualitas laporan keuangan dengan dimediasi oleh sistem pengendalian intern. Penggunaan SPI sebagai variabel mediasi di karenakan adanya kelangkaan penelitian, tidak banyak penelitian yang menggunakan sistem pengendalian intern sebagai variabel mediasi dengan variabel independennya kompetensi SDM dan kualitas penyajian laporan keuangan sebagai variabel dependent. Dalam Agustina (2016) kompetensi sumber daya manusia dalam lingkungan pengendalian mempunyai pengaruh negative terhadap kelemahan pengendalian intern. Artinya semakin baik kompetensi sdm dalam lingkungan

pengendalian SKPD maka akan mengurangi kelemahan sistem pengendalian intern. Dengan menciptakan sumber daya yang berkompeten dapat terhindar dari kelemahan pengendalian intern. Penelitian ini juga di dukung dari penelitian Shintia dan Erawati (2017) menemukan bahwa adanya keterkaitan SPI dengan kualitas LKPD . SPI dalam penelitian ini bertujuan ini untuk memastikan bahwa LKPD yang disusun dan disampaikan pemerintah daerah berkategori wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah. Penelitian Sihite dan Holiawati (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah terbukti efektif dan efesien dalam meningkatkan kualitas penyajian LKPD

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empirik pengaruh kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Untuk menguji secara empirik pengaruh kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI)?
3. Untuk menguji secara empirik pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah ?
4. Untuk menguji secara empirik pengaruh kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah melalui Sistem Pengendalian Internal (SPI)?

1.4 Sistematika Penulisan

Tujuan penulisan dari penelitian ini secara sistematis adalah untuk mempelajari seluruh rangkaian penulisan dan untuk memudahkan dalam menyusun penelitian

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini memperkenalkan latar belakang fenomena kualitas laporan keuangan yang mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerja SKPD sebagai tuntutan dari akuntabilitas. Tujuan dari penelitian ini variabel independen kompetensi sdm memiliki hubungan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan melalui sistem pengendalian intern sebagai variabel mediasi (intervening) pada SKPD pemerintah Banyuwangi. Bab 1 juga memperkenalkan *research gap*, tujuan melakukan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada penelitian bab ini, menjelaskan *grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori berpengaruh positif atau tidaknya variabel independent terhadap dependent melalui variabel mediasi.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini memperkenalkan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Bab ini menjelaskan tentang jenis dan sumber data yang digunakan, data yang dikumpulkan sesuai prosedur, serta batasan dan ruang lingkup penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuisioner.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat mengenai gambaran umum objek penelitian yaitu kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas penyajian laporan keuangan melalui sistem pengendalian intern serta uraian mengenai objek penelitian yang meliputi pembahasan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Pada bab ini juga akan terkandung pembahasan untuk mengevaluasi hasil berdasarkan permasalahan penelitian seperti yang telah tercantum pada bab pertama.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan mengenai hasil dan pembahasan tentang pengaruh kompetensi sdm terhadap kualitas penyajian laporan keuangan daerah dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel mediasi (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten banyuwangi).